## LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

							ь.	No.
						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non		. Sasaran
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Program
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							Sub Kegiatan
Jumlah Perizinan yang dipantau pemenuhan komitmennya	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non - perizinan yang dilayani secara elektronik	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Prosentase pertumbuhan perusahaan yang memiliki izin	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesual Dengan SOP	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan dengan survey	IKM Pelayanan Perizinan	Indikator Kinerja
100 izin	2500 izin	5%	800	28,0%	94,0%	4	83,5	Target Tahunan
108	3206	10,00%	100%	29,00%	96,38%	1,7	92,44	Realisasi Kinerja
data pelaku usaha	aplikasi OSS RBA. SICANTIK.SIMBG dan SIMPEL	data pelaku usaha	pelayanan sudah dilimpahkan ke dpmptsp	Minat masyarakat mengikuti pelatihan cukup tinggi	Petugas sudah memahami OPD masih harus tugasnya untuk diingatkan melakukan verifikasi	Petugas sudah memahami OPD masih harus tugasnya untuk melakukan verifikasi	Anjungan SKM tersedia di MPP, pemohon yang melakukan konsultasi secara online juga diarahkan untuk mengisi	Faktor Pendorong
komitmen yang harus di penuhi persyaratan dasar, pbg.izin lingkungan dan sif dimana harus	sistem OSS dan sicantil masih sering terkendala	pelaku usaha sanggup untuk memenuhi kewajiban sesuai	adanya peraturan baru tentang izin yang belum ada di pendelegasian	Kesadaran untuk membuat ijin usaha masih kurang	dingatkan	i OPD masih harus diingatkan	Kurangnya kesadaran pengguna layanan untuk mengisi SKM	Faktor Penghambat
pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar sesuai peratuaran perundang-undangan	sistem OSS dan sicantik OSS langsung menghubungi masih sering 08116774642 atau melalui terkendala kontak @oss.go.id SICANTIK melalui Hapdesk sicantik go.id	menindak lanjuti kekurangan sesuai di standar izin	belum masuk pada belum masuk pada pendelegasian	Disediakan layanan penerbitan NIB di akhir sesi pelatihan	Perlu aplikasi yang dapat memberikan notifikasi	Perlu aplikasi yang dapat memberikan notifikasi	Petugas mengarahkan pengguna layanan yang datang langsung ke MPP	Tindak Lanjut
105,956,592	192.506.828		363,033,948		363,033,948			Pagu Anggaran
105.956.592	192,506,828		363.03 3.03 9.48		363.033,948			Rp
100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			*
105.899.156	189,952,959		360.177.119		360.177.119			September %
99,95%	98,67%		99,21%		99,21%			*

					The second secon			-				THIS NOT LOUGH		
					Programming interfac (API) yang disediakan oleh masing- masing sistem	mempunyai dbms dan bahasa pemrograman yang berbeda	teknologi informasi yang cukup memadahi			data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik		dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada		
98,61%	39,616,100	100,00%	40.174.000	40.174.000	Mengakses Application	informasi online	tersampaikan ke masyarakat Tersedianya perangkat	100%	80%	yang tersedia untuk publik				
					Melakukan sosialisasi	Masyarakat belum banyak memanfaatkan	Informasi yang diberikan menjadi mudah	100%	100%	Persentase data dan Informasi pelayanan PM				
							masyarakat			Informasi PM			SISTEM	
						informasi online	tersampaikan ke			Informasi dan Sistem			N DAN DATA	
98,61%	39,616,100	100,00%	40.174.000	40.174.000	Melakukan sosialisasi	Masyarakat belum	Informasi yang diberikan	10,60%	10%	Persentase pertumbuhan			PROGRAM	
			111		Menganggarkan sosialisasi pada TA 2024 atau 2025	Belum teranggarkan sosialisasi secara tatap muka	Tersedianya data pemohon potensial yang memiliki kesempatan untuk mengajuan permohonan insentif dan kemudahan PM	12	10 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi tentang fasilitas/Insentif PM				
					berupa pengurangan pajak/retribusi	retribusi PBG	modal			kepada Perusahaan	entif			
99,31%	6.266.000	100,00%	6,309,500	6.309.500	Memperluas kebijakan pemberlan insentif dan kemudahan PM tidak hanya	Yang diberikan selama ini hanya berfokus pada pengurangan	Kemudahan proses pengajuan insentif dan kemudahan penanaman	2	2 Perusahaan	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian remberian fasilitas/ins			
					mengkomunikasikan dengan OPD yang terkait	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aduan yang disampaikan	Ketersediaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi	13	10 Pemohon	Jumlah layanan pengaduan lingkup kota yang ditindaklanjuti				
					sosialisasi terkait perizinan	kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat	Tersedianya media kurangnya informa konsultasi offline maupun yang diterima oleh online masyarakat	817	800 Pemohon	Jumlah layanan konsultasi lingkup kota yang ditindaklanjuti				
					Melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan aduan masyarakat	Aduan yang masuk bukan menjadi kewenangan DPMPTSP	Adanya SOP penanganan pengaduan yang mengatur respon atas pengaduan yang masuk	100%	100%	Prosentase pengaduan tentang perizinan yang terselesaikan				
					Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan memberikan	Kompetensi petugas perlu ditingkatkan	Tersedianya media Kompetensi petug konsultasi offline maupun perlu ditingkatkan online	100%	100%	prosentase konsultasi tentang perizinan yang terselesalkan				
					penyelesalan aduan yang lebih cepat	membutuhkan tindaklanjut dilevel lebih tinggi	permohonan konsultasi				Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
99,65%	58.059.004	100,00%	58,261,028	58.261.028	Berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan respon dan	Pengaduan yang disampaikan atau konsultasi yang dimohonkan	Adanya SOP/instruksi kerja yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan dan	830	810 Pemohon	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan			

				2				
			Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja					
PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
							Pengolahan, Penyajian Jumlah masyarakat dan Pemanfaatan Data mengunjungi media informasi dan mema perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
Persentase Investor PMA/PMDN	Persentase pertumbuhan Investor baru	Prosentase pertumbuhan modal usaha	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Jumlah pemeliharaan sistem elektronik pelayanan	Jumlah data dan informasi PNP berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah masyarakat yg a mengunjungi media informasi dan memahami tata cara pengajuan izin	Persentase Data dan Informasi Pelayanan Penanaman Modal yang direviu/diupdate
100%	10%	4%	3 Investor	16%	6	5 data dan informasi	21.122	100%
127,53%	561,70%	4,57%	00	16,29%	g,	cn.	24417	100%
tumbuhnya usaha baru sektor swasta	Bitek/pelatihan wirausaha kemitraan belum baru optial	Banyak Pelaku Usaha yang Pelaku usaha belum bertambah bidang mengisikan modal usahanya usaha secara akurat	sistem OSS RBA	LKPM dengan skala besar belum masuk dalam realisal investasi	Tersedianya peralatan untuk melakukan pemeliharaan sistem elektronik	Tersedianya data perizinan	Tersedianya media online untuk publikasi informasi	Sudah terupdate
kurangnya sosialisasi micro	kemitraan belum optial	Pelaku usaha belum mengisikan modal usaha secara akurat	regulasi yang ada dala sistem OSS belum mengakomodir penyelesaian permasalahn yang muncul dalam perijinan	krangnya event kegiatan tk nasional yang dapat meningkatkan investasi daerah	Anggaran untuk penggantian komponen elektronik	sinkronisasi data	belum semua masyarakat mengetahui cara mengakses informasi	Sudah terupdate
target 2024	tingkaatkan konsinyasi UMB dg mikro kecil	Melakukan verifikiasi kepada pelaku usaha	koordinasi da konsultasi di tk pusat dan propinsi	perencanaan event daerah	perencanaan pemeliharaan sistem elektronik untuk tahun berikutnya	koordinasi internal	sosialisasi terkait media informasi	
122.781.300							40.174.000	
122.781.300				, .			40.174.000	
100,00%							100,00%	
122.198.244							39.616.100	
99,53%						-	98,61%	

					Perlu sosialisasi dan publikasi kebijakan melalui sarana media yang lebih kekinian dan dengan konten- konten yang menarik	Belum semua penerima manfaat memenuhi kewajiban pembayaran retribusi PBG, meskipun pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pengurangan retribusi bangunan gedung telah dirmasukkan.	Telah dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil monitoring	ω	3 Pelaku Usaha	Jumlah Penerima Insentif yang di monev			
97,50%	9.542.778	100,00%	9.787.300	9.787.300	Menunggu permohonan insentif oleh pelaku usaha			2	2 kegiatan usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
99,70%	112655466	100,00%	112.994.000	112.994,000	Proses registrasi nomor di Biro Hukum Provinsi Jateng	Belum dilakukan proses pengesahan Raperda menjadi Perda	Koordinasi yang baik dengan Bagian Hukum Setda sehingga proses pendaftaran fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jateng telah dilaksanakan	1	1	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	Penetapan kebijakan daerah mengenal pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal		
	122.198.244	100,00%	122.781.300	122,781,300	Perlu publikasi melalui sarana media yang lebih kekinian dan dengan konten- konten yang menarik	Kurangnya publikasi kepada pelaku usaha tentang adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bagi investor di Kota Magelang, sehingga jumlah pemohon fasilitas masih sedikit	Tim Evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah memahami substansi aturan pemberian rekomendasi sesuai Perwal No. 9 Tahun 2020	100%	100%	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan PM dengan SOP		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	
					finalisasi proses penyusunan dan pemutakhiran beberapa kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi dan peluang investasi	Masih ada beberapa kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi & peluang investasi perlu disusun atau dilakukan pemutakhiran	Telah disusun kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi dan peluang investasi	00 36	85,00%	Prosentase Peta potensi dan perencanaan yang dimuktahirkan			

											Kabupaten/ Kota		
	100,00%	160.846.500	160.846.500	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Bid asset BPKAD)	Kepeminatan pada lahan milik pemerintah masih menunggu proses tindak lanjut	Kepeminatan Investasi meningkat di Kota Magelang	66,7%	10%	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	7=3	Penyelengg araan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		
	100,00%	160.846.500	160.846.500	perbaiki perencanaan penanggaran	minimnya dukungan anggaran	petugas telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana	100%	100%	Persentase LOI yang ditindaklajuti			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	100,00%	163.285.200	163.285.200	Optimalisasi pemanfaatan hasil review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah, melalui sarana publikasi	Pemanfaatan hasil review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah belum optimal	DPMPTSP telah menyusun dokumen review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah	N	2 dokumen	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kab/kota	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota			
	100,00%	76.399,000	76,399,000	Perlu dilakukan proses pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang oleh Wali Kota Magelang dan penomoran oleh Bagjan Hukum Setda	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang belum melalui proses pengesahan oleh Wali Kota Magelang dan penomoran oleh Bagian Hukum Setda	Koordinasi yang baik dengan Bagian Hukum Setda dan Kemenkumham Kanwil Jateng, sehingga proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi . Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang di Kemenkumham Kanwil Jateng berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>,</b> ⊷	1 dokumen	Jumlah peraturan daerah RUPM Kab/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
233,978,600	100,00%	239.684.200	239.684.200	Optimalisasi pemanfaatan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah melalui sarana publikasi	Belum dilakukan proses distribusi dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah kepada para stakeholder	Koordinasi yang baik dengan pihak Penyedia Jasa Konsultan dan OPD terkait, sehingga proses penyusunan kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah selesal dilaksanakan dan sesuai ketentuan yang berlaku	40%	40%	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota		

		Meningka Nilai AKIP	w						
	Proj Pen Uru Per Dae	Meningkatnya Nilai AKIP					PEN N PEL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota						PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAA N		
Perencanaan,Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan PM	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	Jumlah Sarana Promosi	Jumlah Dokumen Hasil kegaitan promosi PM kab/kota
8 Dokumen	100%	88	>	kegiatan usaha	320 orang	55%	20%	6	71.01
. 00	100,00%	81,85	>	100	446	105,31%	20,00%	6	10
Dokumen perencanaan disusun sesuai dengan timeline tingkat kota	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Koordinasi dengan pelaku usaha dan OPD sektor terkait	kegiatan bimbingan teknis OSS dan LKPM	pelaporan LKPM triwulan III pada tgl 1-10 Oktober 2023	kegiatan bintek/sosialisaasi	Kegiatan Sudah dilaksanakan melalui promosi berbagai media	Jumlah kepeminatan mengalami peningkatan karena dilakukan promosi melalui berbagai meda
Menunggu proses pada OPD lain yang terkait dengan dana diluar DAU	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Sudah terselesaikan sesuai dengan jumlah target tahunan		Bukan periode pelaporan LKPM	kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindak lanjuti permasalahan	Keterbatasan anggaran	
Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan arahan kota dan melakukan koordinasi secara intens dengan bidang dan bagian	Melakukan koordinasi internal secara berkala	Melakukan koordinasi internal secara berkala	Melakukan koordinasi internal secara berkala	perencanaan pengawasan tahun depan	beberapa pelaku perencanaan bimbingan usaha yang tidak dapat teknis OSS dan LKPM tahun hadir 2024	pembinaan dan sosialisasi tata cara pembuatan laporan LKPM	tingkatkan monitoring tindak lanjut bintek	Keterbatasan anggaran mengajukan penambahan anggaran keglatan promosi, agar lebih bervariatif dalam	Keterbatasan anggaran mengajukan penambahan anggaran kegiatan promosi, agar lebih bervariatif dalam melaksanakan promosi
10.473,300	4.679.554.594			128.517.064	291.895.747	420.412.811	420.412.811		160.846.500
10.473,300	4.679.554.594			128.517.064	291.895.747	420,412.811	420,412,811		160.846.500
100,00%	100%			100,00%	-	100,00%	100,00%		100,00%
8.789,000	3.198.660.130	,		109.568.565	278.952.316	388,520,881	388,520.881		159,940.755
83,92%	68,35%			85,26%		92,4			99,44%

24,34	2007	Ton'nora	5.379.333,062	3.5/9.500.082	Menyiapkan dokumen pencairan lebih awal sehingga proses verifikasi tidak terganggu dan sesual dengan deadline dari BPKAD	Tim Verifikator tidak standby saat pengajuan dokumen pencairan	Penyediaan Gaji sudah disiapkan oleh BPKAD	2	22 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
67,21%	2410826282	100,00%	3.586,785,182	and the same of th	unan al dari		Sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen- dokumen pada bagian keuangan	15	15 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan OPD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
98,58%	2.666.000	100,00%	2.704.300	2.704:300	Melakukan pemantauan kinerja sectara berkala setiap bulan, Melakukan penyesuaian target kinerja seiring adanya perubahan anggaran maupun kondisi eksisting yang mempengaruhi realisasi kinerja	Masih ada beberapa capaian kinerja yang belum memenuhi target	Pengumpulan data capalan kinerja sudah tepat waktu	2	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
97,40%	838000	100,00%	860.400	860.400	Menggunakan softfile DPPA untuk pedoman pelaksanaan kegiatan	Penandatanganan Tim TAPD memerlukan waktu	Bidang dan bagian cepat melakukan penyesualan anggaran kas	344	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD		
99,78%	916000	100,00%	918.000	918.000	Menggunakan softfile DPPA untuk pedoman pelaksanaan keglatan	Penandatanganan Tim TAPD memerlukan waktu	Bidang dan bagian cepat melakukan penyesualan anggaran kas	ь.	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD		
98,59%	463.000	100,00%	469.600	469.600		Adanya refocusing anggaran pada anggaran penetapan	Penambahan anggaran pada RKA perubahan hanya berjumlah sedikit	ь-	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD		
94,60%	508.000	100,00%	537.000	537.000	Pada penyusunan RKA kedepan agar lebih teliti dan koordinasi lebih intens dengan pengampu kegiatan dan pengelola barang	Ada usulan pengadaan yang belum masuk di RKBMD	Hasil KUAPAS dan hasil desk dengan anggaran dapat segera ditindaklanjuti	-	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD		
98,92%	4.930.000	100%	4.984,000	4.984.000	Mengikuti arahan dan kebijakan penyusunan rencana kerja pada tingkat Kota	Timeline prosos penyusunan dokumen rencana kerja 2024 dari tingkat kota kurang tersosialisasi.	Proses koreksi narasi renja Timeline proses 2024 pada bidang dan penyusunan doi bagian berjalan dengan rencana kerja 20 lancar dari tingkat kota kurang tersosial	2	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

				-		Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Parket of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,								,
99,69%	3,333,500	100,00%	3,344,000	3,344,000	Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan jamuan tamu tahun depan	Kunjungan tamu melebihi perkiraan, sehingga anggaran tidak mencukupi untuk jamuan	Anggaran tersedia	12	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
99,99%	23.450.200	100,00%	23.451.400	23.451.400	Melakukan inventarisasi barang yang dibutuhkan, untuk perencanaan tahun depan	Jenis barang yang tersedia belum sesuai yang dibutuhkan	Anggaran tersedia, stock barang tersedia	23	23 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material			
100,00%	4.200.000	100,00%	4.200.000	4,200,000	Mengusulkan penambahan anggaran untuk bahan bacaan agar lebih lengkap dan bervariasi	Usulan penambahan jenis bahan bacaan tidak dapat dipenuhi karena anggaran terbatas	Anggaran yang tersedia untuk 3 jenis bahan bacaan	ω	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan			
99,26%		100,00%	6.948.000	6,948,000	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia		Anggaran belanja tersedla Pesanan tidak tepat waktu	7	7 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	
98,76%	23.383.425	100,00%	23.678.000	23.678.000	Dilakukan prioritas belanja untuk pemenuhan: pelayanan masyarakat	kan	Anggaran belanja tersedia   Anggaran terbatas,   belanja menyesual	S.	5 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
99,69%	1.880.000	100%	1.885.900	1.885.900	Membuat skala prioritas sesuai kebutuhan		Anggaran belanja tersedia Jumlah kebutuhan melebihi rencana	7	7 paket	i Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
80,73%	95.385,448	ь	109.467.300	109,467,300	Membuat perencanaan yang Jebiha baik	Terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal hasilnya	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	7	7 Keglatan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
97,11%	460.000	100.00%	473.700	473,700	Menyampaikan laporan prognosis sesuai jadwal tingkat Kota		Data laporan sudah tersedia pada aplikasi simda	1	1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
99,08%	4.912.000	100,00%	4,957,800	4.957.800	LRA bulan berjalan dilaporkan bulan berikutnya	Pada awal bulan LRA masih belum memunculkan data keuangan pada bulan yang dilaporkan karena baru selesai pada awal bulan	Sudah ditetapkan sasaran mutu dengan waktu pengiriman laporan keuangan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya	<b>t</b>	13 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulana/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
99,75%	1993000	100,00%	1.998,000	1.998,000	Dilakukan reklas rekening belanja yang sesual	Seringkali ada kesalahan penginputan rekening belanja	Sudah tersedia Surat Edaran Walikota untuk penyusunan laporan akhir tahun		1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

			Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an	3			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Pemeliharaan Mebel	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	n Daerah rusan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	asa usan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan perorang dinas/kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan u dibayarkan pajaknya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
1 unit	S unit	18 Unit	4 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	12 Laporan
-	v	50 00	4	12	12	12	w	12
Anggaran tersedia, sudah ada rekanan yang ditunjuk	Anggaran tersedia dan sudah ada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan	Anggaran tersedia dan sudah ada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	Anggaran yang tersedia sudah sesual rincian gaji pegawai Non ASN dan pembayaran retribusi sampah	Ketersediaan anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan	Anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	Anggaran belanja tersedia Undangan rakor luar kota tidak dapat dilaksanakan semua karena anggaran tida mencukupi
Anggaran yang k tersedia terbatas, pemeliharaan mebel menyesuaikan	Anggaran yang Melakuka tersedia terbatas kebutuhar untuk memenuhi dan meny pemeliharaan kendaraan operasional dipelihara yang ada	Anggaran tidak mencukupi untuk pemeliharaan sesuai yang dibutuhkan karena sebagian besar kendaraan sudah lama	Terdapat kegiatan yang belum maksimal hasilnya	Adanya aturan baru untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus disesuaikan	Terdapat tagihan yang melebihi perkiraan	Keterlambatan dalam pengiriman surat	Terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal hasilnya	*
Mengusulkan penambahan anggaran dan inventarisasi mebel yang rusak berat untuk usulan penghapusan	Melakukan inventarisasi kebutuhan pemeliharaan dan menyusun prioritas kendaraan yang harus dipelihara	Mengusulkan penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta mengusulkan penghapusan untuk kendaraan yang rusak berat	Membuat perencanaan yang lebih baik untuk tahun yang akan datang	Dibayarkan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku	Melakukan efisiensi dan penghematan pemakalan serta mengadakan sosialisasi penghematan energi kepada seluruh pegawai	Dibuat jadwal untuk petugas yang melaksanakan pengiriman surat dan dilakukan monev rencana yang akan datang	Membuat perencanaan yang lebiha balk	Membuat skala prioritas dan pembatasan jumlah personil yang berangkat disesualkan dengan anggaran yang tersedia
750.000	37.109.000	84,727,000	144,496,000	237,661,812	586.551.000	4.100,000	828.332.812	45,300,000
750.000	37.109.000	84.727.000	144,496,000	23/,681.812	586,551,000	4.100.000	828.332.812	40.290.000
100.00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	AUGUNA
750.000	34,602.300	83,667,800	115.488.800	230,810,914	535,890.650	3.741.000	568.170.600	10.00
100,00%	93,25%	98,75%	79,93%	70,440,656	91,36%	91,24%	68,59%	70

				-
		Lainnya	Peralat	Pemeli
			an dan Mesin	naraan
		dipelihara	mesin lainnya yang	Jumlah peralatan dan
				15 Unit
				15
			ada rekanan yang ditunju	Anggaran tersedia, sudah
		anggaran yang ada	k menyesuaikan	Pemeliharaan
barang sesuai kondisinya	prioritas pemeliharaan	penghapusan dan membuat	rusak berat untuk usulan	Inventarisasi barang yang
				21.910.000
				21.910.000
				100,00%
				21.910.000 100,00
				100,00%

Magelang, 5 Januari 2024 Kepala DPMPTSP Kota Magelang

KHUDHOIFAH, SH, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19650827 199003 2 005